

INDONESIA PERLUAS CAKRAWALA

Oleh:

DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., M.A.

Apresiasi tinggi tampaknya layak kita sampaikan kepada jajaran diplomat Wakil Tetap RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena secara langsung dan rasional menyatakan menolak pengesahan pernyataan kutukan terhadap Iran dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) beberapa waktu lalu. Draft pernyataan pers DK PBB itu disusun setelah mendapat masukan dari perwakilan tetap Israel di PBB yang kemudian disokong penuh oleh perwakilan tetap Amerika Serikat (AS) di PBB.

Walaupun prakarsa pernyataan pers untuk mengutuk Iran itu didukung mayoritas anggota DK PBB, sikap Indonesia tetap tidak bergeming. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang langsung secara tegas menyampaikan penolakan terhadap draft pernyataan pers DK PBB yang berniat mengutuk keras pernyataan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad soal kehancuran rejim Zionis.

Tak pelak lagi langkah diplomasi Indonesia kali ini bagaikan magnet dalam fokus politik dunia saat ini. Bagi negara-negara maju anggota DK PBB, khususnya Amerika Serikat, sikap Indonesia tersebut seolah-olah merupakan tohokan keras di muka mereka. Sedangkan bagi negara-negara berkembang *move* politik Indonesia ini merupakan langkah diplomasi yang piawai untuk menggugat ketidakadilan DK PBB yang sangat didominasi AS dalam mengeluarkan dan mengesahkan kebijakan-kebijakannya, khususnya yang berkenaan dengan reaksi DK PBB yang tidak pernah mengeluarkan satu pun pernyataan kepada media terhadap tindakan brutal tentara Israel selama ini terhadap bangsa Palestina. Namun, ketika Wakil Tetap Israel di PBB meminta DK PBB untuk melakukan tindakan terhadap pidato Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, dalam waktu singkat DK PBB segera bereaksi, berembuk dan berupaya mengesahkan pernyataan pers untuk mengutuk pernyataan Presiden Iran tersebut.

Memang sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kurun waktu 2007-2008 (terpilih setelah didukung oleh 158 negara anggota PBB), Indonesia memang diharapkan dapat memaksimalkan artikulasi perannya dalam Dewan Keamanan PBB, khususnya dalam menghadapi berbagai masalah perdamaian dan keamanan internasional yang mendesak. Dengan kata lain, selama masa keanggotaannya di DK PBB, tindakan dan

posisi Republik Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri akan menjadi sorotan masyarakat internasional.

UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa "daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama". Sementara dalam UU Nomor: 37 Tahun 1999 antara lain disebutkan "hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia (Pasal 1, Ayat 1). Sedangkan politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional (Pasal 1, Ayat 2).

Sikap tegas Indonesia ini makin memantapkan kredibilitas politik Indonesia yang bebas-aktif. Dengan citra dan kredibilitas demikian Indonesia dapat memainkan peranan yang penting di dalam hubungan internasional

=====

Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.